

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi Indonesia saat ini bersifat terbuka dan mendorong lembaga pemerintahan, termasuk Pemerintah Desa. Untuk bersaing di berbagai sektor dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam setiap aktivitas dan didukung oleh fasilitas dan infrastruktur. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Indonesia didasarkan pada Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk beradaptasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, Pasal 11 tentang Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat (Rachmawati & Prapanca, 2024, hlm. 7).

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Di Indonesia, organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peran krusial dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang berfokus pada keluarga. PKK tidak hanya menjalankan program-program pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial di tingkat

komunitas. Peran ini memerlukan adanya kapasitas organisasi yang kuat, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang teratur dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan sangat penting agar semua kegiatan PKK dapat dilaksanakan dengan efisien transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Etty Harya Ningsi et al., 2025, hlm. 31).

Peran dapat dianggap sebagai posisi (status) ketika individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi tersebut, maka individu itu akan menjalankan sebuah peran. Secara fundamental, peran bisa didefinisikan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang timbul dari jabatan tertentu. Program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan inisiatif nasional dalam pembangunan komunitas yang berasal dari tingkat bawah, dikelola oleh dan untuk masyarakat, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik dan berbudi luhur, hidup sehat dan sejahtera, makmur serta mandiri, menciptakan kesejahteraan dan keadilan gender, serta meningkatkan keadaan hukum dan lingkungan.

Program Kesejahteraan Keluarga berfungsi sebagai *platform* yang mendorong partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks keluarga, sehingga dapat menampung dan mewujudkan aspirasi serta inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mekanisme dan Gerakan yang telah berkembang di Desa-desanya di seluruh negeri, PKK menunjukkan keberhasilan dengan perempuan sebagai pusat peran. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah inisiatif pembangunan komunitas yang berkembang dari bawah dengan perempuan sebagai pendorong utama dalam membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk menggerakkan, dan membina demi terwujudnya keluarga sejahtera (Rachmawati & Prapanca, 2024, hlm. 7).

Kehidupan yang banyak didambakan oleh banyak orang di dunia ini adalah kesejahteraan, baik secara jasmani maupun rohani, baik tinggal di kota maupun di Desa, semua orang mendambakan kehidupan yang sejahtera. Namun, kehidupan ini tidak selalu dalam kondisi sejahtera, perubahan naik turunnya kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari

pekerjaan kasar seperti buruh hingga pekerjaan kantoran dengan gaji sampai ratusan juta dilakukan oleh manusia. Bahkan tidak jarang orang rela melakukan hal yang haram demi mencapai kesejahteraan hidup (Nur Aisyah Qadri Saiful, 2023).

Kesejahteraan masyarakat Indonesia berada pada tingkat rata-rata, dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,718 pada tahun 2022, yang mengindikasikan harapan hidup yang sehat, Pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang dapat diterima (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, masih ada sejumlah tantangan besar di berbagai sektor, seperti tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan kurangnya akses yang memadai terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Kerukunan sosial juga memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat.

Menurut Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), tingkat kerukunan di Indonesia akan mencapai 74,91 persen pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan yang baik dapat mendorong toleransi dan keterbukaan terhadap keragaman. Ketika kebutuhan fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat dipenuhi, individu dalam masyarakat akan merasakan hidup yang lebih aman dan nyaman. Dalam kondisi yang makmur, orang-orang akan lebih menghormati perbedaan dan menjalin sosial yang lebih harmonis (Aini, 2018).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat yang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi secara optimal, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, Pendidikan, dan sosial, sehingga menciptakan kualitas hidup yang layak dan berkelanjutan.

Masyarakat dengan SDM yang berkualitas rendah atau yang tidak memiliki keterampilan dalam bidang apapun bisa berakibat pada kemiskinan dalam masyarakat atau dalam unit keluarga. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Indonesia) pada pasal 19 menyebutkan bahwa “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang tidak dapat mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen vital yang mendukung pergerakan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peranan SDM yang sangat krusial dalam pembangunan serta perkembangan ekonomi suatu bangsa. Dengan meningkatkan baik kualitas maupun jumlah SDM di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, produktivitas dapat ditingkatkan, dan kesenjangan sosial-ekonomi dapat diminimalisir. SDM yang berkualitas mampu menjadi penggerak inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan global yang semakin rumit. Usanto, E., & Rahmawati, R. (2021). Partisipasi yang rendah dalam aktivitas sosial dan ekonomi bisa menunjukkan kurangnya kualitas sumber daya manusia, yang disebabkan oleh minimnya keikutsertaan dalam kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan individu. Di sisi lain, kemiskinan yang tinggi dapat memicu rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena masyarakat yang menderita kemiskinan biasanya tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya dan kesempatan serta keterampilan mereka (Ali et al., 2024).

Kesejahteraan berkaitan langsung dengan visi bangsa Indonesia. Negara ini dibangun, dijaga, dan ditingkatkan demi kepentingan semua warganya, yaitu untuk memastikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” (Makplus, 2005). Umumnya, sejahtera merujuk pada kondisi yang positif, dimana individu-individu berada dalam keadaan yang Makmur, sehat, dan tenang. Kesejahteraan suatu komunitas dalam suatu area bisa juga dinilai melalui indeks pembangunan manusia di tempat tersebut (Nur Aisyah Qadri Saiful, 2023).

Keluarga merupakan unit kecil dalam masyarakat dan memiliki peranan penting dalam menciptakan kebahagiaan serta keharmonisan. Keluarga yang harmonis menjadi pondasi utama untuk membentuk individu yang memiliki karakter baik dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang damai dan makmur. Orang tua

berperan sebagai pendidik utama dalam menyampaikan nilai-nilai moral, etika, dan kewajiban kepada anak-anak. Keharmonisan dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki, saling mendukung, serta rasa empati yang berkontribusi positif terhadap keharmonisan sosial. Meskipun menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah perkara mudah, komunikasi yang efektif dan kesadaran akan peran masing-masing anggota keluarga sangatlah vital. Dengan menjaga keharmonisan dalam keluarga, kita berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan sejahtera (Aini, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan populasi memperhatikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk individu yang memiliki karakter dan mendukung keharmonisan sosial. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai moral dan komunikasi yang efektif antar anggota keluarga menjadi kunci terciptanya keluarga yang harmonis, yang berkontribusi pada masyarakat yang damai dan sejahtera.

Kesejahteraan keluarga adalah sasaran utama dari PKK, ini karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang memiliki dampak besar pada hasil pembangunan. Berdasarkan keterampilan yang ada, organisasi PKK seharusnya bisa memberikan berbagai jenis keahlian kepada masyarakat, dan melalui potensi perempuan yang dimiliki oleh organisasi ini, diharapkan dapat menginspirasi dan membimbing masyarakat untuk terus belajar demi memperbaiki kualitas hidup mereka (Destri Rahmawati, 2019).

Perempuan bisa mampu dengan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri. Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup mereka. PKK yang mengumpulkan anggota dari berbagai lapisan masyarakat diharapkan mampu membawa keluarga ke kondisi yang sejahtera. Keluarga sejahtera artinya keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia secara material, sosial, mental, dan spiritual serta keluarga yang berdaya, yaitu keluarga yang hidup nyaman, maju, dan mandiri. Selain itu, PKK juga diharapkan mampu melepaskan perempuan dari pengaruh budaya patriarki, sehingga mereka bisa lebih mandiri. Dengan adanya PKK, posisi dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga diharapkan meningkat. Dalam hal programnya, PKK bertujuan mendorong perempuan agar bisa menjalankan

peran ganda dengan baik, yaitu sebagai pengelola rumah tangga, pencari nafkah, dan pelaku pembangunan. Dengan demikian, tujuan dari PKK adalah mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada pada diri perempuan sehingga mereka bisa memanfaatkan hal dan kesempatan yang sama dalam pembangunan (Destri Rahmawati, 2019).

Potensi wanita untuk menjadi mandiri dan mampu menyelesaikan masalah sendiri melalui penguasaan keterampilan adalah fondasi penting dalam proses pemberdayaan. Namun, peningkatan kapasitas ini tidak terjadi sendirinya atau dalam waktu singkat, tetapi memerlukan partisipasi aktif dan keterlibatan nyata dari masyarakat dalam setiap tahapannya. Hanya dengan mekanisme partisipatif yang inklusif, program pemberdayaan dapat berjalan dengan optimal, memastikan bahwa peningkatan kapasitas yang dicapai benar-benar berasal dari kebutuhan nyata dan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi wanita dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam memberdayakan potensi wanita, perempuan di Desa Sukapura dapat mengikuti program pembuatan hantaran nikah untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Hantaran merupakan tradisi pemberian barang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi ini menjadi bagian dari budaya perkawinan yang memiliki nilai simbolis dan sosial dalam masyarakat. Hantaran dimaknai sebagai wujud penghormatan, keseriusan, dan tanggung jawab calon mempelai laki-laki terhadap calon pasangannya. Selain itu, hantaran juga mencerminkan kesiapan calon mempelai laki-laki dalam memenuhi perannya sebagai kepala keluarga serta menunjukkan komitmennya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, mandiri, dan sejahtera. Dengan demikian, hantaran tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap adat perkawinan, tetapi juga sebagai simbol kesiapan dan kesanggupan dalam memasuki kehidupan berkeluarga (Ibrahim et al., 2023. hlm. 61).

Proses penguatan tidak berlangsung secara otomatis, melainkan melalui keterlibatan serta partisipasi masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik. Agar proses penguatan dapat terus berlangsung dan sukses, diperlukan bukan hanya partisipasi dan penguasaan pengetahuan serta teknologi, tetapi juga upaya untuk

membangun SDM agar mampu menyesuaikan cara berpikir dan tindakan mereka dengan perubahan yang terjadi, memiliki rasa tanggung jawab, dan berperan aktif dalam menjaga hasil atau usaha yang telah dilakukan (Margayaningsih, 2018).

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dalam program PKK di Desa Sukapura, terlihat bahwa masih banyak anggota keluarga yang belum memiliki keterampilan ekonomi yang memadai untuk mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Meskipun program tersebut sudah berjalan dan berbagai pelatihan sudah diberikan, kemampuan mereka dalam mengelola usaha serta memanfaatkan potensi yang ada masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi di Desa Sukapura terjadi secara lambat dan belum memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan keluarga.

Dalam meningkatkan ekonomi keluarga, Desa Sukapura mengandalkan pelatihan praktis dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) guna mengatasi masalah pengangguran dan rendahnya kompetensi warga. Program yang menasar para ibu ini berfokus pada kewirausahaan dan pengelolaan usaha mikro dengan pendekatan praktik langsung. Tujuannya adalah membangun kemandirian ekonomi melalui terciptanya usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.

Dari hasil observasi, peneliti menyimpulkan jika keterampilan ini dilatih lebih serius dengan bimbingan yang lebih tekun, hasilnya pasti lebih nyata dan bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena pada akhirnya, kemampuan mengelola keuangan keluarga merupakan faktor utama untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup. Belum semua masyarakat dapat mengoptimalkan keterampilan dalam pelatihan hantaran nikah ini menjadi sumber penghasilan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Maka dari itu, sangat penting adanya program PKK di Desa Sukapura yang benar-benar mampu memberdayakan keluarga dan membawa perubahan positif di masa depan.

Maka dari itu, peneliti rasa perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan keterampilan ekonomi keluarga. Dengan bimbingan yang tepat dan dukungan yang terus menerus, masyarakat di Desa Sukapura bisa lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka dan menarik peluang baru untuk meningkatkan penghasilan. Dengan cara ini, Program PKK

tidak hanya menjadi tugas rutin, tapi benar-benar bisa membantu memperbaiki kualitas hidup setiap keluarga di Desa Sukapura.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan melalui Pembuatan Hantaran Nikah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi fenomenologi di Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka dapat dirumuskan masalah tentang: Bagaimana tahapan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pembuatan hantaran nikah dalam meningkatkan ekonomi keluarga di PKK Desa Sukapura?

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Pemberdayaan Perempuan

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif perempuan Desa Sukapura dalam konteks pelatihan pembuatan hantaran nikah didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas dan keterampilan peserta melalui pelatihan teknis yang sistematis, bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi serta memperkuat peran aktif dalam menghasilkan produk hantaran nikah yang berkualitas dan bernilai ekonomi. Proses ini melibatkan pengetahuan dan praktik kerja yang relevan sehingga peserta dapat menerapkan keahlian tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai sumber penghasilan alternatif.

1.3.2 Hantaran Nikah

Pembuatan hantaran nikah merupakan kegiatan menyusun, menghias, dan mengemas berbagai barang yang akan digunakan sebagai hantaran dalam acara pernikahan sehingga memiliki tampilan yang menarik dan nilai estetika yang baik. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan keterampilan, kreativitas, serta teknik tertentu untuk menghasilkan hantaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

1.3.3 Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan kondisi yang menggambarkan kemampuan keluarga dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Ekonomi keluarga mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perolehan pendapat pengelolaan pengeluaran, pengaturan keuangan, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara terencana dan berkelanjutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah atau metode yang diterapkan oleh tim PKK dalam melaksanakan program pemberdayaan serta untuk memahami program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Sukapura.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik dari segi teoritis, praktis, maupun empiris yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mengembangkan teori tentang pemberdayaan masyarakat, terutama melalui program PKK, serta menjelaskan hubungan antara pemberdayaan tersebut dengan peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi para akademis dalam memahami cara kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

1.5.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan referensi dan dasar teori yang memadai untuk penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dan program PKK, serta menjadi sumber informasi untuk pengembangan penelitian dengan pendekatan atau fokus yang berbeda atau lebih dalam.

2) Bagi Tim PKK

Menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan dalam merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan serta meningkatkan ekonomi keluarga di desa.

3) Bagi Masyarakat

Memberikan bahan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan dalam merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan serta meningkatkan ekonomi keluarga.